



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur)

Daniar Ajeng Argandini^{1*}, Radjikan², Muhammad Roisul Basyar²

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : ajengargandini22@gmail.com¹, radjikan@untag-sby.ac.id², roisulbasyar@untag-sby.ac.id³

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Korespondensi penulis : ajengargandini22@gmail.com

Abstract. *The Family Hope Program (PKH) is a social protection policy aimed at reducing poverty through conditional cash transfers to low-income families. This study analyzes the implementation of PKH in Kedungrejo Village, Waru District, Sidoarjo Regency, using a descriptive qualitative approach and the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn. The findings indicate that the implementation of PKH has been effective, as seen in the implementers' understanding of the program, inter-agency communication, and stable socio-political support. However, challenges remain, including delays in fund disbursement, limited technical capacity at the sub-district level, and public dissatisfaction with beneficiary data validation. Therefore, the study recommends a more structured disbursement schedule, improved technical capacity of implementers, and the involvement of community leaders in the data collection process to ensure better targeting and sustainability of the program.*

Keywords: *Family Hope Program (PKH), policy implementation, poverty, Van Meter and Van Horn, social assistance.*

Abstrak. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu kebijakan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dengan cara mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan PKH di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik dilihat dari pemahaman para pelaksana, komunikasi antar lembaga, serta dukungan sosial dan politik yang konsisten.

Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang ditemukan seperti penundaan dalam pencairan dana, keterbatasan teknis di tingkat kecamatan, dan ketidakpuasan masyarakat terkait dengan validasi data. Oleh karena itu, disarankan agar pencairan dana dijadwalkan dengan lebih teratur, peningkatan kapasitas teknis bagi pelaksana, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pendataan agar program ini bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), pelaksanaan kebijakan, kemiskinan, Van Meter dan Van Horn, bantuan sosial.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah masalah penting yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, meskipun ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan dalam penurunannya selama lima tahun terakhir. Menurut data dari BPS, persentase masyarakat yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 10,19% di tahun 2020 menjadi 9,03% pada 2024, menunjukkan keberhasilan dari berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu program utama dalam hal ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimulai sejak

tahun 2007 sebagai bentuk dukungan sosial untuk keluarga-keluarga miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, dan kesehatan. PKH adalah bantuan sosial yang bersifat terpenuhi syarat, dengan pelaksanaannya mengikuti Permensos Nomor 10 Tahun 2017 dan diperbaharui melalui Permensos Nomor 1 Tahun 2018 (Peraturan.bpk.go.id, 2018), serta menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan konteks politik, ekonomi, dan kebudayaan sosial di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. (KemenseknegRI, 2018)

Tabel 1 Provinsi Termiskin Di Pulau Jawa

Provinsi	Presentase
Daerah Istimewa Yogyakarta	10,83%
Jawa Tengah	10,47%
Jawa Timur	9,79 %
Jawa Barat	7,46%
Banten	5,84%
DKI Jakarta	4,30%

Sumber; KOMPAS.com

Pada tabel 1, terlihat bahwa Jawa Timur mencatatkan diri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Pulau Jawa, dengan persentase sebesar 9,79% atau sekitar 3.982.690 jiwa, meski ada penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,35%. Garis kemiskinan per kapita bulanan di daerah ini mengalami kenaikan menjadi Rp 536.122, sedangkan garis kemiskinan per rumah tangga meningkat menjadi Rp 2.273.157, yang mencerminkan tantangan ekonomi yang masih ada. Sebagai satu dari provinsi dengan populasi terbesar, Jawa Timur berhadapan dengan sejumlah masalah sosial dan ekonomi seperti kesenjangan pembangunan, keterbatasan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi sebagai alat penting dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan bersyarat untuk meningkatkan akses keluarga yang kurang mampu terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. (Diva Lufiana Putri, 2024)

Sidoarjo, yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan sektor industri dan pertaniannya, masih menghadapi tantangan sosial seperti kemiskinan meski telah mengalami perkembangan yang cepat. Penurunan angka kemiskinan yang konsisten

setiap tahunnya menunjukkan bahwa kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peranan penting dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. PKH di Sidoarjo diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Perda, 2024), dan merujuk pada data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, Desa Kedungrejo di Kecamatan Waru tercatat sebagai desa dengan jumlah penerima PKH tertinggi. Ini menunjukkan bahwa desa tersebut menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mencerminkan tingginya kebutuhan sosial dan ekonomi serta fokus dari intervensi pemerintah daerah agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata.

Tabel 2 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Waru

Kecamatan	Desa		Jumlah Penerima
Waru	Kedung rejo		187
	Tropodo		173
	Ngingas		147
	Kureksari		134
	Tambakrejo		123
	Wedoro		121
	Bungurasih		102
	Brebek		93
	Kepuhkiriman		83
	Pepelegi		78
	Wadungsari		69
	Tambaksawah		67
	Waru		63
	Medaeng		62
	Tambak Sumur		59
	Tambakoso		52
	Janti		43
Total			1.656

Sumber/Source : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2024

Desa Kedungrejo di Kecamatan Waru tercatat sebagai desa dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak dalam lima tahun terakhir, dengan jumlah 187 penerima dari keseluruhan 11.722 penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun desa ini memiliki populasi yang relatif besar dan mengalami kemajuan, masih ada banyak warga yang menghadapi masalah ekonomi dan belum bisa memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. PKH, yang merupakan program bantuan sosial untuk keluarga miskin, membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Banyaknya penerima PKH di Desa Kedungrejo menjadi tanda bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan baik. Ketergantungan pada bantuan sosial menunjukkan adanya jurang kesejahteraan di tengah pertumbuhan desa. Keberadaan PKH di desa ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya dukungan yang berkelanjutan agar kesejahteraan penduduk dapat tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan informasi yang ada, tujuan dari penelitian lebih lanjut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah dan masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan penerapan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini diharapkan agar program ini dapat dijalankan dengan lebih efektif dan mampu mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi di daerah tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian tentang pelaksanaan kebijakan publik, terutama program perlindungan sosial yang berbasis bantuan bersyarat seperti PKH. Melalui model Van Meter dan Van Horn, studi ini juga membuktikan efektivitas kerangka tersebut dalam menilai kebijakan sosial di tingkat lokal. Di sisi praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terutama bagi Dinas Sosial dan para pendamping PKH, dalam meningkatkan pengelolaan program, memperkuat kapasitas pelaksana, serta membangun mekanisme evaluasi partisipatif yang lebih peka terhadap keadaan masyarakat penerima bantuan. Penelitian ini juga berpotensi menjadi pedoman dalam menentukan strategi pemutakhiran data kemiskinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku sebagai bagian dari keberhasilan program PKH.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pemerintahan, karena di sinilah diharapkan kebijakan yang sudah dirancang dapat direalisasikan secara konkret dan memberikan efek langsung kepada masyarakat. Dalam hal penanganan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial bersyarat. (Muluk & Rahmawati, 2024)

Studi ini mengadopsi pendekatan teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn. Pada pandangan mereka, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh enam faktor kunci, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan: Sejauh mana tujuan dan arah dari kebijakan sudah dinyatakan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh para pelaksana di lapangan.
2. Sumber Daya: Ketersediaan dana, tenaga kerja, serta fasilitas yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana: Tingkat kerja sama dan penyampaian informasi antara instansi atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana: Kemampuan, komitmen, dan pengalaman para pelaksana di lapangan dalam melaksanakan program.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi pelaksanaan, seperti situasi masyarakat penerima manfaat dan dukungan dari pihak-pihak terkait.
6. Disposisi Implementator: Kesungguhan dan motivation para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan. (Fauziyah & Arif, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan mengacu kepada enam indikator tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dipahami sejauh mana kebijakan PKH berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya.

Temuan dari analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai efektivitas pelaksanaan PKH di tingkat lokal, sekaligus memberikan masukan penting bagi perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, berhasilnya penerapan kebijakan sangat tergantung pada kesiapan lembaga yang melaksanakan, partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat, serta dukungan dari berbagai pihak, baik di bidang administratif maupun politik. Dalam kajian oleh Dandi Darmadi, Dimas Adhi, Yulio Astria, dan Reynaldus pada tahun 2021 mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa program tersebut belum berjalan dengan optimal. Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah adanya ketidakakuratan dalam penentuan sasaran penerima bantuan, yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pendamping PKH dan ketua RT setempat. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara pelaksana program di tingkat masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan sosial seperti PKH. (Darmadi, 2021)

Studi ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PKH sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementator. Meskipun program ini telah memberikan dampak positif terhadap penurunan kesulitan ekonomi warga, beberapa kendala seperti ketidakakuratan dalam menentukan sasaran penerima bantuan dan kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dan ketua RT masih menjadi halangan yang signifikan. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi antar pihak serta kesiapan institusi agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, yang dianalisis melalui pendekatan penelitian kualitatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara detail pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan metode ini didasarkan pada keinginan penelitian untuk memahami secara kontekstual dinamika pelaksanaan PKH dari perspektif para pembuat kebijakan serta penerima manfaat. Lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan bahwa Desa Kedung Rejo memiliki jumlah penerima PKH tertinggi di Kecamatan Waru, yaitu sebanyak 187 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2024. Penelitian ini fokus pada enam variabel utama dalam model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi implementator.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan narasumber yang terdiri dari perwakilan dinas sosial, pihak Kecamatan Waru, perwakilan Desa Kedung Rejo, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan Dinas Sosial dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bersamaan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dari berbagai sumber dan metode, serta melakukan konfirmasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran

yang sah, tepat, dan mendalam mengenai pelaksanaan PKH dalam konteks lokal di Desa Kedung Rejo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani masalah kemiskinan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Program ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk mendukung keluarga-keluarga yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Untuk memperoleh wawasan yang komprehensif, penelitian ini melibatkan beberapa sumber informasi, yaitu Dinas Sosial, perwakilan Kecamatan Waru, Pemerintah Desa Kedungrejo, pendamping PKH setempat, dan para penerima manfaat PKH. Dalam melakukan analisis tentang pelaksanaan program ini, digunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa elemen, termasuk standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementator.

Melalui teori tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana kebijakan PKH diimplementasikan di lapangan, kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dapat memengaruhi hasil program ini. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan PKH dalam mengurangi kemiskinan di Desa Kedungrejo serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo menunjukkan bahwa pelaksana telah memahami dengan baik standar dan tujuan kebijakan yang ada. Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pendamping PKH, sedangkan pelatihan dilakukan di tingkat kabupaten dan survei bagi calon penerima dijalankan langsung oleh pendamping di desa. Dengan adanya prosedur yang rapi, bantuan dapat disalurkan dengan tepat kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19, terutama dalam hal pendidikan serta kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan PKH telah diterapkan dengan baik dalam konteks setempat.

2. Sumber Daya

Manajemen sumber daya dalam Program PKH di Desa Kedungrejo belum berjalan dengan maksimal karena penyaluran dana sering terlambat, mengakibatkan masalah bagi penerima manfaat yang membutuhkan. Proses pencairan dilakukan secara bertahap, sehingga kelompok berikutnya harus menunggu kelompok sebelumnya selesai terlebih dahulu. Kurangnya pemahaman teknis dari aparat desa dan kecamatan mengenai mekanisme pencairan dana juga menghalangi efektivitas program ini. Oleh karena itu, adalah penting untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar tingkat pelaksana agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan merata

Tabel 3. Kriteria Dan Nominal Untuk Penerima PKH

<u>Kriteria</u>	Nominal
<u>Balita 1 tahun</u>	Rp. 3.000.000
Ibu Hamil	Rp. 3.000.000
<u>Disabilitas</u>	Rp. 3.000.000
<u>Lansia</u>	Rp. 2.400.000
Pendidikan SD	Rp. 750.000
Pendidikan SMP	Rp. 1.500.000
Pendidikan SMA	Rp. 2.000.000

Sumber: wawancara Pendamping PKH Desa Kedungrejo

3. Komunikasi Antar Organisasi

Interaksi antara pelaksana PKH di Desa Kedungrejo berlangsung dengan baik dan terbuka, yang terlihat dari adanya rapat koordinasi rutin antara pendamping PKH, pemerintah desa, kecamatan, hingga Dinas Sosial. Pendamping secara aktif menyampaikan informasi kepada penerima manfaat baik melalui pertemuan langsung maupun grup WhatsApp, terutama saat ada keterlambatan dalam pencairan dana. Hubungan yang terbangun antar organisasi membantu kelancaran pelaksanaan program dan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan, mengindikasikan bahwa aspek komunikasi telah berjalan dengan baik dan efektif.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana PKH di Desa Kedungrejo menunjukkan sifat positif seperti kesiapan, kapabilitas, serta komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Pendamping memahami dengan baik tujuan program dan melaksanakan pendataan secara teliti.

Kerjasama antara pelaksana dari tingkat desa hingga kabupaten berlangsung harmonis, ditambah dengan dukungan moral dari para pendamping untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini diperkuat oleh penilaian penerima manfaat yang menganggap pelaksana responsif dan komunikatif, menciptakan suasana pelaksanaan program yang mendukung dan efisien.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Keberhasilan PKH di Desa Kedungrejo sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang stabil serta mendukung. Hubungan yang baik antar lembaga pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat turut memperkuat kelancaran program. Bantuan yang diberikan dianggap sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Stabilitas politik setempat juga menciptakan situasi yang mendukung, menjadikan faktor eksternal ini sebagai penunjang utama keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa.

6. Disposisi Implementator

Sikap para pelaksana terhadap PKH di Desa Kedungrejo secara umum cukup positif, terlihat dari integritas, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Namun, masih ada tantangan seperti pemahaman teknis yang terbatas di tingkat kecamatan dan ketidakpuasan warga terkait validasi data penerima manfaat. Masalah ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman teknis dan perbaikan proses validasi data menjadi hal yang penting untuk memperkuat pelaksanaan program di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo umumnya berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pemahaman kebijakan yang baik, komunikasi efektif, pelaksana yang responsif, serta dukungan kondisi sosial dan ekonomi yang stabil. PKH membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, terutama dalam pendidikan dan kesejahteraan dasar. Namun, masih ada tantangan seperti keterlambatan pencairan dana dan ketidakpuasan atas validasi data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, transparansi data, dan penguatan kapasitas pelaksana agar PKH lebih optimal dan tepat sasaran.

Pelaksanaan PKH di Desa Kedungrejo masih menghadapi kendala seperti lambatnya pencairan dana dan kurang akuratnya data penerima. Solusinya meliputi penjadwalan pencairan yang jelas, penyuluhan intensif tentang prosedur, serta pelibatan tokoh

masyarakat dalam pendataan. Koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping, dan pemerintah kecamatan dan desa juga perlu ditingkatkan melalui komunikasi rutin. Dengan perbaikan ini, PKH diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga kurang mampu.

DAFTAR REFERENSI

- Anin, S., Tiza, A. L., & Fritantus, Y. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kebersihan lingkungan di Terminal Kefamenanu Kelurahan Kefa Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 6(1), 10–18. <https://doi.org/10.32938/jan.v6i1.2832>
- Ardyansyah, D. (2020). Kebijakan publik sebagai kebijakan publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3).
- Darmadi, D. (2021). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi pada Nira Tebu*, 2(5).
- Diva Lufiana Putri, I. E. P. (2024, Juli 4). Daftar provinsi paling miskin di Jawa 2024, DIY urutan teratas. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/133000765/daftar-provinsi-paling-miskin-di-jawa-2024-diy-urutan-teratas>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- KemenseknegRI. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025*.
- Muluk, F. A., & Rahmawati, I. D. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi garis kemiskinan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Media Akademik*, 2(7). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/658>
- Peraturan.bpk.go.id. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018*.
- Perda. (2024). *PERDA Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2024*. *Ayan*, 8(5), 55.
- Prima, A., Dwi, Y., & Ub, A. R. (2023). *Implementation of the Family Hope Program in Ganggang Panjang Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency [Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ganggang Panjang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo]*. <http://dx.doi.org/10.21070/ups.2762>

- Program, I., Harapan, K., Sebagai, P. K. H., Baru, G., Moro, K., & Barat, K. N. (2024). Vadel, Maringan, Primawati. 2, 1–8.
- Publik, J. R., & Harapan, P. K. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi masyarakat miskin di Kota Batu (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 18(3), 90–97.
- Ramadhani, M. T. (2014). Implementasi kebijakan tunjangan kinerja bagi pegawai Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda. *Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi pada Nira Tebu*, 3(1), 84–98.
- Susilo, H. E., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo–Kota Batu. *Skripsi*. <http://103.164.117.216/handle/071061/2973>
- Ummah, M. S. (2019). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.